

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di setiap perusahaan harus ada orientasi untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan, sehingga perusahaan mampu berusaha membangun citra yang baik di masyarakat yang memperhatikan keadaan lingkungan sekitar atau memiliki rasa tanggung jawab sosial, yang lebih dikenal sebagai CSR (*Coorporate Social Responsibility*). Menurut Gosllimh Daam Vochycht (2007) dalam Dwi Karina (2013), tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilihat sebagai kewajiban bisnis untuk bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan dan bukan hanya ditujukan terhadap tujuan keuangan semata. Dewi (2011) mengemukakan bahwa CSR adalah pemanfaatan sumber daya yang ada demi mencapai laba yang sesuai dengan aturan tanpa ada kecurangan. Kegiatan bisnis perusahaan yang bergerak menggunakan sumber daya alam secara langsung dan secara tidak langsung dapat menimbulkan dampak baik positif maupun negatif pada lingkungan sekitar perusahaan seperti masalah limbah, keamanan dan kebersihan produk maupun tenaga kerja, polusi asap pabrik, dan lainnya. Adanya dampak pada lingkungan tersebut dapat mempengaruhi kesadaran akan pentingnya penerapan CSR (*Coorporate Social Responsibility*) atau tanggung jawab mengenai sosial perusahaan menjadi tren global, semakin maraknya masyarakat global (luas) yang peduli mengenai barang-barang yang ramah akan lingkungan dan diolah dengan memperhatikan keadaan sekitar dan sosial. Salah satu alasan

perusahaan mengungkapkan kinerja lingkungan, sosial dan finansial didalam laporan tahunan ataupun laporan dipisah adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, dan para investor serta stakeholder lainnya. Pada saat ini banyak perusahaan di Indonesia yang mengklaim bahwa perusahaan mereka telah melaksanakan kewajiban sosialnya terhadap publik maupun lingkungan sekitar perusahaan. Tujuan dari pengungkapan ini adalah untuk membangun hubungan komunikasi yang efektif dan untuk membangun kepercayaan tentang bagaimana CSR dan lingkungan sosial terintegrasi dalam semua aspek operasi dalam kaitannya dengan perusahaan, publik dan pemangku kepentingan lainnya (Dwi Karina, 2013).

Pendapat Tanudjaja (2009) perbedaan antara perusahaan dalam CSR akan menyebabkan perbedaan dalam implementasi CSR anata perusahaan, tergantung bagaimana perusahaan memahami CSR. Pelaporan CSR bersifat sukarela, dan sanksi tidak langsung diberikan oleh pemangku kepentingan dan memiliki dampak yang signifikan terhadap perusahaan. Disinilah pentingnya langkah-langkah CSR di Indonesia untuk memiliki kekuatan terpasang, kekuatan mengikat dan dorongan. Perkembangan CSR di Indonesia dalam pelaksanaannya dapat dilihat dari 2 perspektif yang berbeda. Perkembangan CSR di Indonesia pada awalnya bersifat sukarela (*voluntary*) untuk memperbarui CSR yang diperluaskan menjadi *mandatory* (yang terikat secara hukum). Jika dilihat dari segi dasar pelaksanaannya, CSR di Indonesia harus dibagi secara konseptual antara implemntasi CSR yang dijalankan oleh perusahaan besar atau perusahaan kecil-menengah (*small-medium enterprise/SME*) Solihin 2008.

Perkembangan CSR diharapkan dapat memberikan kontribusi terukur dan sistematis untuk dunia bisnis dalam partisipasinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, disisi lain masyarakat juga tidak bisa seenaknya membuat tuntutan ke perusahaan jika harapannya melampaui batasan aturan yang digunakan (Tanudjaja, 2009). Kadek Yudiantara (2015) menyebutkan bahwa CSR juga dapat berfungsi sebagai pelindung dan pembantu perusahaan untuk meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis.

Pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (revisi 2012) paragraf 15 secara implisit menyarankan untuk mengungkapan tanggung jawab akan masalah lingkungan dan sosial perusahaan sebagai berikut :

“Perusahaan dapat pula menyajikan terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup, dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standart Akuntansi Keuangan”.

Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan menyatakan bahwa perusahaan tidak berkewajiban untuk mengungkapkan informasi sosial khususnya informasi tentang bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan disekitar perusahaan. Dampak dari PSAK yang belum mewajibkan pengungkapan informasi sosial menimbulkan praktik pengungkapan informasi

yang sukarela masih belum diterapkan oleh semua perusahaan. Jika manfaat yang diperoleh perusahaan dengan cara pengungkapan informasi mengenai sosial tersebut lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk mengungkapkannya, maka secara sukarela perusahaan akan mengungkapkan informasi tersebut.

Pada tahun 2007 muncul Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai CSR Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang menyebutkan bahwa *“Perusahaan yang melanjutkan kegiatan bisnisnya dilapangan dan berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam maka wajib menanggung tanggung jawab mengenai sosial dan lingkungan disekitar perusahaan”*. Sementara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 15 (b) menyatakan bahwa *“setiap investor wajib menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan”*. Namun saat ini telah diterbitkan adanya peraturan baru yang merupakan amanat dari UU Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 ayat 4 yaitu Perpu Nomor 47 tahun 2012 pada bulan April 2012. Pada pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa perusahaan perseroan yang kegiatan usaha pada suatu bidang atau berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam maka wajib menyantunkan CSR. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa CSR wwajib dilakukan disekitar lingkungan baik didalam maupun diluar perusahaan. Pada pasal 6 menjelaskan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan tercantum dalam laporan keuangan tahunan perusahaan dan bertanggung jawab untuk rapat umum pemegang saham.

Sebagian kelompok yang menolak berpendapat bahwa perusahaan adalah organisasi yang berorientasi laba dan bukan sekelompok orang, tetapi juga

tidak pada organisasi sosial. Dikarenakan perusahaan telah membayar pajak negara, maka tanggung jawab mengenai sosial (masyarakat) beralih kepada tanggung jawab pemerintah. Sedangkan sekelompok yang mendukung berpendapat bahwa perusahaan seharusnya wajib menanggung tanggung jawab mengenai sosialnya. Oleh karena itu, para perusahaan tidak hanya perlu memikirkan keuntungan finansial dari perusahaan saja. Ini juga harus menjadi lebih peka dan peduli akan masyarakat, terutama orang-orang yang berada di sekitar lingkungan perusahaan. Namun disisi lain, kelompok pengusaha yang melakukan pelaporan CSR akan merasa kehilangan sukarela dalam kegiatan CSR mereka. CSR sebagian besar dilakukan oleh perusahaan dan kasus ini telah diadopsi secara luas, tetapi sampai sekarang tidak ada definisi pasti tentang CSR.

Menurut Untug (2008) CSR bertanggung jawab untuk berkontribusi pada kemajuan ekonomi di masa depan dengan berfokus pada keseimbangan antara isu-isu ekonommi, sosial, dan lingkungan perusahaan. Sedangkan menurut Hadi dan Sabeni (2002) dalam (Dwi Karina, 2013) faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan tahunan perusahaan adalah dasar dari perusahaan. Perusahaan dapt dilihat dalam kepemilikan sahamnya, terlepas apakah perusahaan memiliki kepentingan konstitusional yang dapat berupa kepemilikan saham pemerintah maupun kepemilikan saham asing. Kepemilikan saham pemerintah memastikan bahwa perusahaan harus mematuhi kepentingan pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya. Pemerintah memiliki hak untuk menunjuk eksekutif perusahaan untuk menjadi perpanjangan dari kepentingan pemerintah (Amran dan Devi, 2008).

Implementasi CSR di Indonesia dapat diindikasikan sebagai hasil dari peningkatan nilai perusahaan asing setelah pelaksanaan CSR dalam operasi perusahaan. Sehingga para investor asing tersebut membentuk sebuah nilai-nilai yang diterapkan pada perusahaan dalam kegiatan operasional perusahaan di Indonesia. Perusahaan yang berbasis luar negeri memiliki kecanggihan teknologi yang cukup baik, keterampilan karyawan yang baik, jaringan informasi yang cukup luas, memungkinkan pengungkapan luas (Puspitasari, 2009). Status perusahaan juga mempengaruhi kinerja dan ruang lingkup penyajian laporan tahunan, termasuk laporan sukarela perusahaan sehingga dapat dilihat dari jenis perusahaan, ukuran perusahaan dan rofitabilitas perusahaan (Puspitasari, 2009). Etik Sulistyoningsih (2013) berpendapat jika tipe perusahaan berpengaruh secara luas terhadap pengungkapan sosial perusahaan. Jenis profil tinggi mengungkapkan lebih banyak aktivitas sosial perusahaan daripada jenis profil rendah. Meskipun sifat peraturan pemerintah wajib dengan hukuman untuk pelanggar menunjukkan bahwa profil tinggi, bisnis low-profile harus menerapkan aturan yang berlaku bagi mereka. Dampak sosial setiap perusahaan harus berbeda karena setiap perusahaan memiliki karakteristik yang membedakan satu perusahaan dengan yang lain.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh (Amran dan Devi, 2008), terdapat enam faktor yang bisa mempengaruhi pengungkapan CSR di perusahaan Malaysia. Faktor-faktor ini adalah pemegang saham asing, kepemilikan saham dalam manajemen, ketergantungan pada negara, ketergantungan pada mitra industri asing, ukuran dan profitabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian Dwi Karina (2013) dengan mengadopsi beberapa faktor dan menambahkan

faktor baru. Faktor yang diambil adalah faktor kepemilikan saham institusional, profitabilitas dan leverage. Dan terdapat perbedaan pada penelitian ini yaitu hanya terdapat 3 faktor seperti yang disebut diatas dan periode penelitian yaitu 2010-2017.

Menurut (Dwi Karina, 2013) suatu keputusan pengungkapan informasi sosial akan berdampak pada pengeluaran sehingga dapat menurunkan tingkat pendapatan. Menurut teori agensi, jika perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi dapat mempengaruhi tanggung jawab mengenai sosial dan dibuat sehingga tidak menjadi sorotan para kreditor. Brigham (2006) dalam (Etik Sulistyoningsih, 2013), sampai sejauh manakah perusahaan bergantung pada hutang (leverage) akan memiliki implikasi penting, termasuk meningkatkan hutang maka investor akan membatasi investasi yang mereka berikan. Perusahaan besar umumnya memiliki aktivitas yang lebih menyeluruh dan kompleks, memiliki dampak yang lebih besar terhadap perusahaan. Amaran dan Devi (2008), perusahaan dengan kekuatan keuangan yang kuat berada ditekanan yang lebih besar dari lembaga eksternal untuk lebih mengungkapkan tanggung jawab mengenai sosial mereka dan harus lebih agresif dalam melaksanakan kegiatan CSR.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, penelitian ini akan menganalisa laporan CSR dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di bursa Efek Indonesia. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa ruang lingkup pelaporan sosial tahunan (PSL) perusahaan meningkat baik dari segi aspek sosial dan lingkungan, secara politik (Dwi Karina,2013).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan saham institusional berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan BUMN?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan BUMN?
3. Apakah leverage berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan BUMN?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kepemilikan saham institusional terhadap pengungkapan CSR.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan CSR.

1.4 Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh leverage terhadap pengungkapan CSR.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bisa dijadikan dasar pengungkapan *Corporate Social Responsibility* bagi perusahaan lainnya.

2. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan keilmuan akuntansi khususnya terkait *sustainability reporting*.

1.6 Batasan Penelitian

Agar peneliti hanya fokus pada masalah penelitian yang sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan, maka peneliti memberikan batasan penelitian pada masalah :pengaruh kepemilikan saham institusional terhadap pengungkapan CSR, pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan CSR, pengaruh leverage terhadap pengungkapan CSR pada periode 2010-2017.